



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BASTIAN  
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
3. NHK : 432493

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 655.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/81 m2 di KOTA BENGKULU ,  
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000  
2. Tanah Seluas 2000 m2 di KOTA BENGKULU , WARISAN Rp.  
120.000.000  
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/48 m2 di KOTA BENGKULU ,  
WARISAN Rp. 65.000.000  
4. Tanah Seluas 1500 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.  
120.000.000  
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/24 m2 di KOTA BENGKULU ,  
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 138.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SOUL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
6.000.000  
2. MOTOR, YAMAHA MIO M3 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
7.500.000  
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
125.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 3.920.000

**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 276.100

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 797.696.100

**III. HUTANG** Rp. 126.000.000



**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

671.696.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.